

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1. Paparan Data Hasil Penelitian

4.1.1. Latar Belakang Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang berdiri berdasarkan Surat Keputusan Presiden No. 50 tanggal 21 Juni 2004. Bermula dari gagasan para tokoh Jawa Timur untuk mendirikan lembaga pendidikan tinggi Islam di bawah Departemen Agama, disusunlah Panitia Pendirian IAIN Cabang Surabaya melalui Surat Keputusan Menteri Agama No. 17 Tahun 1961 yang bertugas untuk mendirikan berkedudukan di Malang. Keduanya merupakan fakultas cabang IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan diresmikan bersamaan oleh Menteri Agama pada 28 Oktober 1961. Pada 1 Oktober 1964 didirikan juga Fakultas Ushuluddin yang berkedudukan di Kediri melalui Surat Keputusan Menteri Agama No. 66/1964.

Dalam perkembangannya, ketiga fakultas cabang tersebut digabung dan secara struktural berada di bawah naungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama No. 20 tahun 1965. Sejak saat itu, Fakultas Tarbiyah Malang merupakan fakultas cabang IAIN Sunan Ampel. Melalui Keputusan Presiden No. 11 Tahun 1997, pada pertengahan 1997 Fakultas Tarbiyah Malang IAIN Sunan Ampel beralih status menjadi Sekolah

Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Malang bersamaan dengan perubahan status kelembagaan semua fakultas cabang di lingkungan IAIN se-Indonesia yang berjumlah 33 buah. Dengan demikian, sejak saat itu pula STAIN Malang merupakan lembaga pendidikan tinggi Islam otonom yang lepas dari IAIN Sunan Ampel.

Di dalam rencana strategis pengembangannya sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Pengembangan STAIN Malang Sepuluh Tahun ke Depan (1998/1999-2008/2009), pada paruh kedua waktu periode pengembangannya STAIN Malang mencanangkan mengubah status kelembagaannya menjadi universitas. Melalui upaya yang sungguh-sungguh usulan menjadi universitas disetujui Presiden melalui Surat Keputusan Presiden RI No. 50, tanggal 21 Juni 2004 dan diresmikan oleh Menko Kesra Prof. H. A. Malik Fadjar, M.Sc atas nama Presiden pada 8 Oktober 2004 dengan nama Universitas Islam Negeri (UIN) Malang dengan tugas utamanya adalah menyelenggarakan program pendidikan tinggi bidang ilmu agama Islam dan bidang ilmu umum. Dengan demikian, 21 Juni 2004 dijadikan sebagai hari kelahiran Universitas ini.

Sempat bernama Universitas Islam Indonesia-Sudan (UIIS) sebagai implementasi kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Sudan dan diresmikan oleh Wakil Presiden RI, Dr. (Hc) H. Hamzah Haz pada 21 Juli 2002 yang juga dihadiri oleh para pejabat tinggi pemerintah Sudan. Secara spesifik akademik, Universitas ini mengembangkan ilmu pengetahuan tidak saja bersumber dari metode-metode ilmiah

melalui penalaran logis seperti observasi, eksperimentasi, survei, wawancara, dan sebagainya. Tetapi, juga dari al-paradigma integrasi. Oleh karena itu, posisi matakuliah studi keislaman: al-Hadits, dan Fiqih menjadi sangat sentral dalam kerangka integrasi keilmuan tersebut.

Secara kelembagaan, sampai saat ini Universitas ini memiliki 6 (enam) fakultas dan 1 (satu) Program Pascasarjana, yaitu: (1) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, menyelenggarakan Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI), Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), dan Jurusan Pendidikan Guru Madrasah n Jurusan al-Ahwal al- menyelenggarakan Jurusan Bahasa dan Sastra Arab, dan Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris, dan Jurusan Pendidikan Bahasa Arab (4) Fakultas Ekonomi, menyelenggarakan Jurusan Manajemen, Akuntansi, Diploma III Perbankan Syariah, dan S-1 Perbankan Syariah (5) Fakultas Psikologi, dan (6) Fakultas Sains dan Teknologi, menyelenggarakan Jurusan Matematika, Biologi, Fisika, Kimia, Teknik Informatika, Teknik Arsitektur dan Farmasi. Adapun Program Pascasarjana mengembangkan 6 (enam) program studi magister, yaitu: (1) Program Magister Manajemen Pendidikan Islam, (2) Program Magister Pendidikan Bahasa Arab, (3) Program Magister Agama Islam, (4) Program Magister Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), (5) Program Magister Pendidikan Agama Islam, dan (6) Program Magister al-Ahwal al-Syakhshiyah. Sedangkan untuk program doktor

dikembangkan 2 (dua) program yaitu (1) Program Doktor Manajemen Pendidikan Islam dan (2) Program Doktor Pendidikan Bahasa Arab.

Ciri khusus lain Universitas ini sebagai implikasi dari model pengembangan keilmuannya adalah keharusan bagi seluruh anggota sivitas akademika untuk menguasai bahasa Arab dan bahasa Inggris. Melalui bahasa Arab, diharapkan mereka mampu melakukan kajian Islam melalui sumber aslinya, yaitu al-
dan melalui bahasa Inggris mereka diharapkan mampu mengkaji ilmu-ilmu umum dan modern, selain sebagai piranti komunikasi global. Karena itu pula, Universitas ini disebut bilingual university. Untuk mencapai maksud terse-but, dikembangkan

n.

Melalui model pendidikan semacam itu, diharapkan akan lahir lulusan yang berpredikat ulama yang intelek profesional dan/atau intelek profesional yang ulama. Ciri utama sosok lulusan demikian adalah tidak saja menguasai disiplin ilmu masing-masing sesuai pilihannya, tetapi juga menguasai al-
utama ajaran Islam.

Terletak di Jalan Gajayana 50, Dinoyo Malang dengan lahan seluas 14 hektar, Universitas ini memordernisasi diri secara fisik sejak September 2005 dengan membangun gedung rektorat, fakultas, kantor administrasi, perkuliahan,

laboratorium, kemahasiswaan, pelatihan, olah raga, bussiness center, poliklinik dan Development Bank (IDB) melalui Surat Persetujuan IDB No. 41/IND/1287 tanggal 17 Agustus 2004.

Pada tanggal 27 Januari 2009, Presiden Republik Indonesia Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono berkenan memberikan nama Universitas ini dengan nama Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Mengingat nama tersebut cukup panjang diucapkan, maka pada pidato dies natalis ke-4, Rektor menyampaikan singkatan nama Universitas ini menjadi UIN Maliki Malang.

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang adalah perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Agama yang dipimpin Rektor, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama. Universitas secara fungsional dibina oleh Menteri Agama Direktur Jenderal Pendidikan Islam, dan pembinaan bidang ilmu umum secara teknis-akademis dilaksanakan oleh Menteri Pendidikan Nasional cq. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. Pembinaan di bidang pengelolaan keuangan dilaksanakan oleh Menteri Keuangan.

Untuk meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan bidang pendidikan kepada masyarakat, Universitas telah mengembangkan organisasinya menjadi Badan Layanan Umum (BLU) melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.05/2008 tentang Penetapan UIN Malang sebagai Badan Layanan Umum.

Dalam rangka implementasi Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU), organisasi Universitas disesuaikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Adapun Pimpinan Badan Layanan Umum adalah:

1. Pemimpin Universitas adalah Rektor yang berperan sebagai pembantu Menteri di bidang yang menjadi tugas kewajibannya.
2. Rektor mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perumusan kebijakan dan memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat; membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi dan hubungan dengan lingkungannya.
3. Rektor dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Rektor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
4. Wakil Rektor terdiri atas Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (WR I), Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan (WR II), dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama (WR III).
5. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga mempunyai tugas membantu Rektor dalam bidang akademik dan lembaga.
6. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan mempunyai tugas membantu Rektor dalam bidang administrasi umum, perencanaan, dan keuangan.

7. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama mempunyai tugas membantu Rektor dalam bidang kemahasiswaan dan kerjasama.
8. Rektor dan Wakil Rektor bertindak sebagai Pemimpin BLU dan berfungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan Universitas.

Setelah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum (BLU), instansi pemerintah diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan, khususnya keuangan yang diperoleh dari sumbangan masyarakat, seperti uang pendaftaran mahasiswa baru, SPP, Praktikum dan dana Linnya. Dengan fleksibilitas penggunaan keuangan yaitu diharapkan UIN Maliki Malang harus berhasil meningkatkan kualitasnya. Instansi pemerintah yang berstatus BLU diberi peluang untuk mengembangkan sumber-sumber pendanaan sehingga bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Dengan status BLU UIN Malang diberi keleluasaan untuk mengembangkan program bisnis guna mendapatkan tambahan pendanaan, dengan catatan tidak menambah beban Mahasiswa misalnya dengan menaikkan besarnya SPP. Dengan beralihnya status UIN Malang sebagai BLU penuh, UIN Malang diberikan peluang untuk menambah kesejahteraan pegawai, dengan catatan dana penambahan kesejahteraan diperoleh dari usah-usah bisnis yang dikembangkan dan bukan dana yang bersumber dari APBN. Dengan status BLU penuh mendorong seluruh pimpinan pada berbagai tingkatan hingga kepala bagian unit terbawah untuk memiliki jiwa intrepneur atau jiwa kewirausahaan. Dengan jiwa tersebutlah agar terbentuk suatu pemikiran tidak hanya menghabiskan anggran tetapi bagaimana

anggaran tersebut bisa lebih dan dapat dimanfaatkan kembali untuk anggaran berikutnya. Dengan system seperti pebisnis inilah system BLU dapat dijalankan.

4.1.2. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

1. Visi

Menjadi universitas Islam terkemuka dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kekokohan aqidah, kedalaman spiritual, keluhuran akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional, dan menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang bercirikan Islam serta menjadi penggerak kemajuan masyarakat.

2. Misi

- 1) Mengantarkan mahasiswa memiliki kekokohan akidah dan kedalaman spiritual, keluasan ilmu dan kematangan profesional.
- 2) Memberikan pelayanan dan penghargaan kepada penggal ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni yang bercirikan Islam.
- 3) Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pengkajian dan penelitian ilmiah.
- 4) Menjunjung tinggi, mengamalkan, dan memberikan keteladanan dalam kehidupan atas dasar nilai-nilai Islam dan budaya luhur bangsa Indonesia.

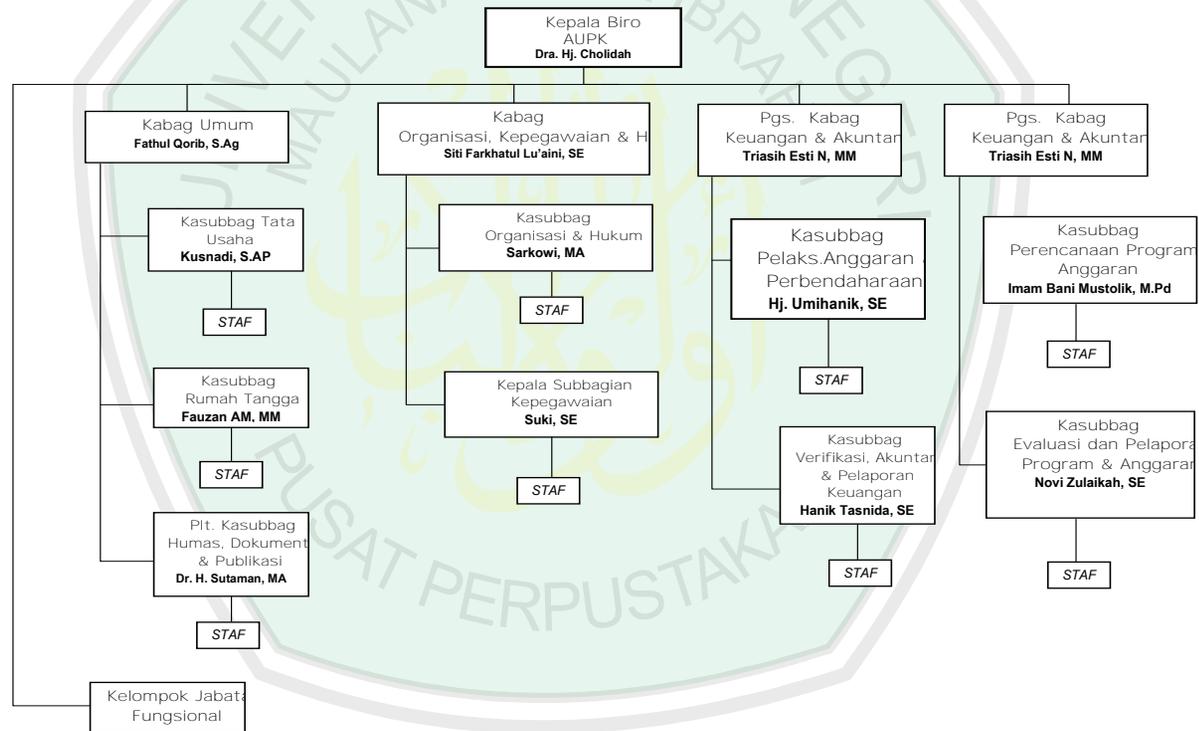
3. Tujuan

- 1) Menyiapkan mahasiswa agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni dan budaya yang bercirikan Islam.
- 2) Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni dan budaya yang bercirikan Islam, dan mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

4.1.3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan diinginkan. Struktur organisasi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang bagian Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan (AUPK) adalah sebagai berikut:

Gambar 4.1
STRUKTUR ORGANISASI
BIRO ADMINISTRASI UMUM, PERENCANAAN DAN KEUANGAN (AUPK)



4.2. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Penerapan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai pengganti PP Nomor 24 Tahun 2005. Dimana PP 71 merupakan penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual murni meskipun didalam peraturan tersebut juga masih diakomodir pilihan menerapkan basis kas menuju akrual sebagaimana yang diatur didalam PP nomor 24 tahun 2005 selama masa transisi dimana pelaksanaan akrual murni paling tidak harus diterapkan paling lambat 5 (lima) tahun setelah peraturan ini diterbitkan.

Hal ini dimaksudkan agar amanat yang tertuang dalam pasal 3 ayat (1) Undang-undang (UU) Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mengharuskan Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, dapat semakin diwujudkan. Salah satu bentuk usaha berkelanjutan tersebut adalah dengan menetapkan Standar Akuntansi Berbasis Akrual yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Penerapan PP No. 24 Tahun 2005 memang masih bersifat sementara, hal ini sesuai dengan amanat yang tertuang dalam pasal 36 ayat (1) UU No. 17 tahun 2003 yang menyatakan bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan maka digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Sementara itu

untuk pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual menurut pasal 36 ayat (1) UU No. 17 tahun 2003 harus dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun.

Pengelolaan keuangan PTN yang menerapkan BLU diatur oleh peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara. Beberapa peraturan utama yang secara khusus mengaturnya yaitu: (1) Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (2) Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, (3) Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, (4) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, (5) PMK No. 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum, (6) PMK No. 44/PMK.05/2009 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum, dan (7) Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintahan tentang pengelolaan keuangan berbasis akrual.

Akuntansi berbasis akrual, yaitu suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Dalam akuntansi berbasis akrual, waktu pencatatan (*recording*) sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat.

Penerapan PP No. 71 tahun 2010 dalam pelaporan keuangan UIN Maliki Malang yang masih menerapkan *Cash Towart to Acrual*, hal ini diketahui dari metode Pengumpulan data pada penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode wawancara dan observasi, wawancara dilakukan secara langsung dengan pihak Kepala Sub Bagian Akuntansi, sementara metode kedua yaitu dengan Observasi dengan melihat bagaimana penerapan PP No. 71 tahun 2010 pada laporan keuangan 2014 UIN Maliki Malang, selain itu Kasubag Akuntansi menjelaskan penyusunan laporan keuangan yang sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 yaitu:

“Untuk Laporan Keuangan tahun 2014 UIN Maliki Malang masih berbasis Cash Toward To Acrual terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Catatan atas Laporan Keuangan, penerapan yang dilakukan oleh UIN maliki malang yaitu dengan mengaku pendapatan dan belanja dengan basis kas sementara untuk neraca yaitu aset kewajiban dan Modal pengakuannya dengan basis akrual. Pada periode ini yaitu tahun 2015 UIN Maliki malang mulai menerapkan akuntansi berbasis Akrual pada penyusunan laporan keuangannya. (Kasubag Akuntansi Bu Umihanik, 27 Mei 2015)”

Adapun penerapan atas pengidentifikasian, pengungkapan, pencatatan, pengukuran yang telah dilakukan oleh UIN Maliki Malang atas transaksi yang telah dilakukan selama tahun berjalan.

4.2.1. Identifikasi

Tahap pengidentifikasian adalah cara mengklasifikasi transaksi yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam periode tertentu. Pengidentifikasian bukti transaksi juga merupakan salah satu langkah awal dari perancangan jurnal langkah-langkah pengidentifikasian tersebut adalah:

Tahap identifikasi adalah tahap penentuan jenis transaksi yang bersumber dari adanya bukti transaksi sehingga dapat diketahui apakah transaksi tersebut dimasukkan dalam jenis transaksi yang sesuai sehingga pencatatan atas transaksi tersebut sesuai dengan jenisnya. Pengidentifikasian atas asset lancar yang dilakukan oleh UIN Maliki Malang adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi karakteristik transaksi
2. Membuat jurnal standar
3. Merancang jurnal berdasarkan jurnal standar

Adapun tahapan pengidentifikasian transaksi ke dalam jurnal meliputi (Shiro:2015):

- a. Mengidentifikasi transaksi dari dokumen dan sumbernya
- b. Menentukan masing-masing akun yang dipengaruhi oleh transaksi tersebut dan klasifikasikan berdasarkan jenisnya.
- c. Menetapkan apakah akun-akun tersebut mengalami penambahan atau pengurangan yang disebabkan oleh transaksi yang ada.
- d. Menetapkan apakah transaksi tersebut harus didebit atau dikredit akunya.
- e. Memasukkan transaksi ke dalam buku jurnal.

Begini Mbak untuk pengidentifikasian atas transaksi di UIN Maliki Malang dapat di Identifikasi dari Transaksi yang telah dilakuakn yaitu dari bukti transaksi yang diperoleh kemudian dari bukti transaksi tersebut dimasukkan dalam akun-akun kemudian dilihat dari bukti tersebut apakah apakah tansaksi yang terjadi mengalami penguranagn atau penambahan, kemudian dimasukkan kedalam jurnal sesuai dengan jurnal standar yang ada, sehingga dapat menetapkan dalam debit atau ktredit atas transaksi tersebut (Kasubag Akuntansi Bu Umihanik, 27 Mei 2015).”

I. Asset lancar

a. Kas dan setara kas

Transaksi yang diidentifikasi masuk dalam transaksi kas adalah apabila terdapat aliran kas yang masuk ataupun keluar untuk penerimaan ataupun pembayaran pendapatan dan belanja serta pengeadaan barang baik belanja modal maupun pengadaan persediaan yang dilakukan oleh UIN Maliki Malang.

contohnya pembayaran atas pendapatan lain-lain seperti sewa gedung yang dilakukan oleh pihak ketiga, serta pembelian persediaan termasuk pembelian ATK untuk keperluan belajar dan Mengajar yang dilakukan dengan tunai sehingga terdapat aliran kas keluar (Kabag Akuntansi 2014 Bu yona)”

b. Piutang

Transaksi yang termasuk jenis ini adalah transaksi atas pembayaran SPP yang masih harus diterima. Pada akhir periode 2014 pengakuan atas pendaptan dimulai pada akhir tahun 2014 karena pengakuan atas pendapatan pada awal tahun 2014 masih menggunakan kas basis.

“Di UIN Maliki Malang transaksi yang termasuk dalam jenis ini hanya bersumber dari pendapatan yang masih harus diterima dan Di UIN Maliki Malang bersumber dari SPP ((Kasubag Akuntansi Bu Umihanik, 27 Mei 2015)

c. Persediaan

Jenis transaksi yang masuk dalam persediaan adalah pembelian atas perlengkapan dan pemebelian ATK, serta keperluan mahasiswa dan dosen seperti alat-alat praktikum masuk dalam persediaan.

”Transaksi yang masuk dalam jenis persediaan di UIN Maliki Malang yaitu transaksi pembelian perlengkapan belajar dan mengajar serta kebutuhan Praktikum seperti Alat-alat habis pakai yang digunakan untuk Praktikum (Kabag Akuntansi Bu Triasih).”

2. Aset Tetap

Transaksi yang termasuk dalam jenis ini adalah transaksi atas pembelian aset yang umur ekonomisnya lebih dari 1 tahun.

“ Transaksi yang diidentifikasi masuk golongan jenis aset tetap adalah transaksi atas pembelian peralatan dan mesin, tanah, serta aset tetap lainnya, hal ini dapat dilihat dari bukti transaksi atas pembelian aset tetap (wawancara dengan Kabag Akuntansi 2014 Bu Yona).”

3. Kewajiban jangka Pendek

Jenis transaksi yang termasuk dalam kewajiban jangka pendek di UIN Maliki Malang adalah transaksi atas utang kepada pihak ketiga yaitu dosen dan PNS yang gajinya masih belum dibayar oleh pihak UIN Maliki Malang.

Transaksi yang masuk dalam jenis ini adalah transaksi yang pengakuan atas belanja pegawai yaitu beban gaji yang masih harus dibayar oleh UIN Maliki Malang ((Kasubag Akuntansi Bu Umihanik, 27 Mei 2015).”

4. Pendapatan

“ Transaksi yang termasuk dalam jenis ini dari pembayaran SSP, wisuda, pendaftaran Mahasiswa baru, selain itu juga dari sewa dari pihak ketiga yang masuk pada pendapatan lain-lain serta pendapatan hibah (Kasubag Akuntansi Bu Umihanik, 27 Mei 2015).”

4.2.2. Pengakuan

Pengakuan atas akun-akun yang dimiliki uin maliki malang adalah sebagai berikut:

1. Aset Lancar

a. Kas dan setara kas

Pengakuan atas aset lancar yaitu kas dan setara kas yang dilakukan UIN Maliki Malang sesuai paparan dari Kasubag akuntansinya yaitu:

“kas dan setara kas diakui pada saat kas diterima dan kas dikeluarkan dari kas BLU (Kasubag Akuntansi Bu Umihanik, 27 Mei 2015)”

Pengakuan atas kas dan setara kas dalam PP No. 71 tahun 2010 diakui pada saat adanya aliran dana baik masuk maupun keluar. Dari pengakuan atas kas dan setara kas di UIN Maliki Malang sudah sesuai dengan PP No. 71 tahun 2010.

b. Piutang

“Pengakuan atas piutang yang dilakukan UIN Maliki Malang pada tahun 2014 pada akhir tahun anggaran diakui secara akrual basis atas pendapatan SPP saja sedangkan untuk pendapatan hibah dan Pendapatan Lain-lain masih kas basis begitupun yang dilakukan pada tahun 2015 masih sama dengan 2014 (Kasubag Akuntansi Bu Umihanik, 27 Mei 2015).”

Didalam standar PP No. 71 tahun 2010 pada tahun 2010 pengakuan atas piutang adalah harus sudah akrual basis pada periode 2015 sehingga pada pengakuan atas piutang di UIN Maliki Malang belum sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010.

c. Persediaan

“Pengakuan persediaan yang dimiliki UIN Maliki Malang adalah diakui pada saat terjadinya transaksi (accrual basis) pada saat diterima hak kepemilikannya (Kasubag Akuntansi Bu Umihanik, 27 Mei 2015).”

Untuk pengakuan atas persediaan yang dijelaskan dalam Standart Akuntansi Pemerintahan (SAP) yaitu pada PP No. 71 Tahun 2010 dijelaskan bahwa pengakuan atas persediaan adalah diakui pada saat potensi manfaat diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, dan pada saat diterima atau hak kepemilikannya berpindah. Sehingga pengakuan atas persediaan yang dimiliki UIN Maliki Malang sudah sesuai dengan PP No. 71 tahun 2010 pengakuan ini masih sama antar periode 2014 dengan 2015.

2. Aset Tetap

Pengakuan aset yang dimiliki UIN Maliki Malang adalah pada saat memiliki masa manfaat yang lebih dari 1 tahun, dan dapat dinilai setiap tahunnya dengan menggunakan Nilai buku atas aset tersebut, pengakuan aset tetap ini pada tahun 2014 dan 2015 masih sama (Kasubag Akuntansi Bu Umihanik, 27 Mei 2015).”

Pengakuan atas aset tetap dalam standart PP No. 71 Tahun 2010 dijelaskan bahwa aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan atas aset tetap yang dimiliki UIN Maliki Malang sudah sesuai dengan PP No. 71 tahun 2010.

3. Kewajiban

Kewajiban yang dimiliki UIN maliki malang adalah kewajiban jangka pendek yaitu kewajiban pada pihak ke tiga. Pengakuan untuk kewajiban jangka pendek adalah pada saat kewajiban itu timbul. pengakuan atas kewajiban pada tahun 2014 dan 2015 masih sama sehingga tidak ada perbedaan untuk pengakuan atas kewajiban (Kasubag Akuntansi Bu Umihanik, 27 Mei 2015)."

Pengakuan atas kewajiban dalam PP No. 71 Tahun 2010 adalah diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, atau pada saat kewajiban itu timbul. Sehingga pengakuan atas kewajiban sudah sesuai dengan PP 71 tahun 2010.

4. Pendapatan

"Pengakuan atas pendapatan yang dimiliki UIN Maliki Malang untuk pendapatan usaha dan jasa yaitu dari pembayaran SPP diakui pada saat kas diterima atas pendapatan tersebut, begitupun pengakuan pendapatan hibah dan pendapatan lain-lain juga masih berbasis kas. Pada tahun 2015 terjadi perubahan atas pengakuan pendapatan usaha dan jasa yaitu diakui pada saat terjadinya transaksi walaupun kas belum diterima atas pendapatan tersebut, sementara untuk pendapatan hibah dan pendapatan lain masih menggunakan basis kas pada tahun 2015 (Kasubag Akuntansi Bu Umihanik, 27 Mei 2015)"

Pengakuan atas pendapatan yang tercantum dalam PP No. 71 Tahun 2010 yaitu untuk pengakuan pendapatan diakui pada saat transaksi terjadi meskipun kas belum diterima. Sehingga pengakuan atas pendapatan tidak sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 karena pendapatan yang diakui dengan akrual basis hanya pendapatan usaha dan jasa saja sementara untuk pendapatan yang lain pada tahun 2015 masih berbasis kas. Karena seharusnya pengakuan pendapatan pada tahun 2015 harus sudah basis akrual.

5. Belanja

“Pengakuan belanja yang dimiliki UIN Maliki Malang pada tahun 2014 dan 2015 masih basis kas (Kasubag Akuntansi Bu Umihanik, 27 Mei 2015).”

Pengakuan atas belanja dalam PP NO. 71 tahun 2010 untuk periode 2015 harus sudah akrual basis, sehingga dari hasil wawancara tersebut pengakuan untuk belanja di UIN Maliki Malang belum sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010.

4.2.3. Pencatatan

Tahap pencatatan adalah memasukkan transaksi dalam buku jurnal harian. Pencatatan atas transaksi yang telah dilakukan oleh UIN Maliki Malang adalah disajikan dalam jurnal umum:

1. Pembelian aset tetap

Jurnal untuk pembelian aset tetap yang dilakukan UIN Maliki Malang terdapat dua pencatatan yaitu pada saat aset tetap masih deregister atau belum diverifikasi maka transaksi atas pembelian aset tetap dimasukkan ke dalam aset Tetap yang belum deregister adapun jurnalnya adalah:

Uraian	Debet	Kredirt
Aset tetap yang belum diregister	xxx	
Utang yang belum diterima tagihannya		xxx

Sumber: UIN Maliki Malang

Setelah verifikasi atas aset Tetap tersebut akan dilakukan penjumlahan atas aset tetap dengan menghapus akun aset tetap yang belum deregister jurnalnya adalah sebagai berikut:

Uraian	Debet	Kredirt
Aset tetap	xxx	
Aset tetap yang belum deregister		xxx

Sumber: UIN Maliki Malang

Pencatatan atas pembelian Aset Tetap yang dilakukan UIN Maliki Malang sudah sesuai dengan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis AkruaI (SAIBA)

2. Perolehan persediaan

Sama halnya dengan pembelian atas Aset tetap pencatatan atas pembelian persediaan. persediaan yang belum diverifikasi terlebih dahulu dimasukkan pada akun persediaan yang belum deregister, setelah verifikasi atas persediaan telah selesai baru diakui sebagai persediaan dengan menghapus akun persediaan yang belum deregister .

Uraian	Debet	Kredirt
persediaan yang belum deregister	xxx	
Utang yang belum diterima tagihannya		xxx

Sumber: UIN Maliki Malang

Uraian	Debet	Kredirt
Persediaan	xxx	
Persediaan yang belum diregister		xxx

Sumber: UIN Maliki Malang

3. Pendapatan PNBP

Pendapatan PNBP yang dimiliki oleh UIN Maliki malang untuk tahun 2014 dan 2015 pencatatannya adalah sebagai berikut.

Uraian	Debet	Kredirt
Diterima dari entitas lain	xxx	
Pendapatan PNBP		xxx

Sumber: UIN Maliki Malang

4. Pendapatan Hibah

Pencatatan atas transaksi Pendapatan Hibah pada tahun 2015 dan 2014 sistem pencatatannya yaitu sebagai berikut:

Uraian	Debet	Kredirt
Diterima dari entita lain	xxx	
Pendapatan Hibah		xxx

Sumber: UIN Maliki Malang

5. Pendapatan usaha dan jasa

Pencatatan yang dilakukan untuk pendapatan atas jasa pada tahun 2014 dan 2015 berbeda, karena pada tahun 2014 pengekuian atas pendapatan masih berbasis kas dan untuk tahun 2015 sudah berbasis akrual:

Uraian	Debet	Kredirt
Diterima dari entitas lain	xxx	
Pendapatan Usaha dan Jasa lainnya (2014)		xxx

Sumber: UIN Maliki Malang

Uraian	Debet	Kredirt
Piutang pendapatan	xxx	
Pendapatan Usaha dan jasa (2015)		xxx

Sumber: UIN Maliki Malang

Uraian	Debet	Kredirt
Diterima dari entitas lain	xxx	
Pendapatan usaha dan jasa (2015)		xxx

Sumber: UIN Maliki Malang

6. Belanja Pegawai

Pencatatan beban pegawai adalah beban-bean yang bersangkutan dengan kegiatan operasional UIN Maliki malang seperti belanja gaji, belanja pemeliharaan, dan lain-lain. Pencatatan untuk belanja pegawai adalah:

Uraian	Debet	Kredirt
Belanja pegawai	xxx	
Ditagihkan ke entitas lain		xxx

Sumber: UIN Maliki Malang

7. Belanja Administrasi dan Umum

Belanja administrasi Umum ini bersumber dari belanja untuk keperluan pegawai saja, adapun pencatatan untuk transaksi ini adalah:

Uraian	Debet	Kredirt
Belanja administrasi dan umum	xxx	
Ditagihkan kepada entitas lain		xxx

Sumber: UIN Maliki Malang

8. Beban penyusutan Aset Tetap

Pencatatan atas beban penyusutan ini masuk dalam jurnal penyesuaian adapun jurnal penyesuaian atas penyusutan aset tetap adalah :

Uraian	Debet	Kredirt
Beban penyusutan	xxx	
Akumulasi penyusutan aset tetap		xxx

Sumber: UIN Maliki Malang

9. Belanja yang masih harus dibayar

Penyesuaian atas beban yang masih harus dibayar ini muncul karena pada saat pelaporan masih harus membayar kepada pihak ke tiga seperti pembayaran gaji dosen adapun penyesuaiannya adalah:

Uraian	Debet	Kredirt
Beban gaji	xxx	
Belanja yang masih harus dibayar		xxx

Sumber: UIN Maliki Malang

Atas pencatatan yang telah dilakukan oleh UIN Maulana Malik Ibrahim Malang bahwa yang dilakukan UIN Maliki Malang sudah sesuai dengan SAIBA baik untuk jurnal standar setiap transaksi serta juga jurnal penyesuaiannya sudah sesuai dengan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA).

4.2.4. Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran atas pos-pos dalam laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Aset Lancar

a. Kas dan setara kas

“Pengukuran atas kas dan setara kas di UIN Maliki Malang adalah di ukur sebesar nilai nominal yang sesuai dengan besarnya kas yang ada (Kasubag Akuntansi Bu Umihanik, 27 Mei 2015).”

Dalam standar PP No. 71 Tahun 2010 dijelaskan bahwa unruk pengukuran atas kas dan setara kas dicatat sebesar nilai nominal, sehingga pengukuran atas pos kas dan setara kas sudah sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010.

b. Piutang

Pengukuran atas Piutang di UIN Maliki Malang adalah dicatat sebesar nilai nominal atas persediaan (Kasubag Akuntansi Bu Umihanik, 27 Mei 2015).

Pengukuran persediaan dalam PP No. 71 Tahun 2010 menjelaskan bahwa untuk pengukuran atas persediaan dicatat sebesar nilai nominal, sehingga pengukuran atas persediaan yang dilakukan UIN Maliki Malang sudah sesuai dengan PP No. 71 tahun 2010.

c. Persediaan

“Persediaan yang dimiliki UIN Maliki Malang diperoleh dengan pembelian sehingga pengukuran atas persediaan sesuai harga perolehan untuk memperoleh persediaan tersebut (Kasubag Akuntansi Bu Umihanik, 27 Mei 2015).”

Pengukuran atas persediaan dalam PP NO. 71 tahun 2010 dijelaskan bahwa persediaan dicatat sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, yang kedua dicatat sebesar biaya standart apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, dan dicatat sebesar nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan. Dari penjelasan tersebut bahwa Pengukuran atas persediaan di UIN Maliki Malang sudah sesuai dengan PP No 71 Tahun 2010.

2. Aset tetap

“Aset tetap yang dimiliki UIN Maliki Malang terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan bangunan, Konstruksi dalam Pengerjaan, dan Aset Tetap Lainnya. Pengukuran Aset tetap yang kita miliki diukur atau dicatat sebesar harga perolehan (Kasubag Akuntansi Bu Umihanik, 27 Mei 2015).”

Pernyataan standar PP No 71 Tahun 2010 tentang pengukuran atas aset tetap di catat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Sehingga pengukuran aset tetap di UIN Maliki Malang sudah sesuai dengan PP No. 71 tahun 2010.

3. Kewajiban

kewajiban yang kita miliki pengukurannya menggunakan dicatat sebesar biaya kas yang seharusnya diserahkan untuk menyelesaikan utang tersebut atau sering disebut dengan nilai nominal (Kasubag Akuntansi Bu Umihanik, 27 Mei 2015).”

Didalam PP No. 71 tahun 2010 dijelaskan bahwa pengukuran atas kewajiban dicatat sebesar nilai nominal sehingga pengukuran atas kewajiban di UIN Makiki malang sudah sesuai senga PP No. 71 tahun 2010.

4.2.5. Penyajian dan Pelaporan

1. Neraca

Neraca adalah laporan yang meyajikan informasi tentang posisi keuangan BLU pada suatu tanggal tertentu, informasi yang disajikan dalam Neraca adalah

meliputi aset, kewajiban dan ekuitas yang dimiliki oleh BLU. Laporan neraca dalam standar PP No. 71 tahun 2010 yaitu menyajikan informasi yang disajikan adalah:

1. Kas setara kas
2. Investasi jangka pendek
3. Piutang pajak dan bukan pajak
4. Persediaan
5. Investasi jangka panjang
6. Aset tetap
7. Kewajiban jangka pendek
8. Kewajiban jangka panjang
9. Dan ekuitas

Adapun contoh format Neraca yang sesuai dengan PP No. 71 tahun 2010 berbasis akrual adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
SETKER BLU
NERACA

Uraian	20X1	20X0
Aset		
Aset lancar		
Kas Dan Setara Kas	xxx	Xxx
Investasi Jangka Pendek	xxx	Xxx
Piutang Usaha	xxx	Xxx
Piutang Lain-lain	xxx	Xxx
Persediaan	xxx	Xxx
Uang Muka	xxx	Xxx
Biaya Dibayar Dimuka	xxx	Xxx
Jumlah Aset Lancar	xxx	Xxx
Investasi Jangka Panjang	xxx	Xxx

Aset Tetap		
Tanah	xxx	Xxx
Peralatan dan Mesin	xxx	Xxx
Gedung dan Bangunan	xxx	Xxx
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	xxx	Xxx
Aset Tetap lainnya	xxx	Xxx
Konstruksi dalam Pengerjaan	xxx	Xxx
Jumlah Aset Tetap	xxx	Xxx
Akumulasi Penyusutan	(xxx)	(xxx)
Nilai Buku Aset Tetap	xxx	Xxx
Aset Lainnya		
Aset Kerja Sama Operasi	xxx	Xxx
Aset sewa Guna Usaha	xxx	Xxx
Aset Tak Berwujud	xxx	Xxx
Aset Lin-Lain	xxx	Xxx
Jumlah Aset Lainnya	xxx	Xxx
Jumlah Total Aset	xxx	Xxx
Kewajiban		
Kewajiban Jangka pendek		
Utang Usaha	xxx	Xxx
Utang Pajak	xxx	Xxx
Biaya Yang Masih harus Dibayar	xxx	Xxx
Pendapatan Diterima Dimuka	xxx	Xxx
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	xxx	Xxx
Utang Jangka Pendek Lainnya	xxx	Xxx
Jumlah kewajiban Jangka pendek	xxx	Xxx
Kewajiban jangka panjang	xxx	Xxx
Jumlah Total Kewajiban	xxx	Xxx
Ekuitas		
Ekuitas Tidak Terikat		
Ekuitas Awal	xxx	Xxx
Surplus & Defisit tahun Lalu	xxx	Xxx
Surplus & defisit tahun Berjalan	xxx	Xxx
Ekuitas Donasi	xxx	Xxx
Jumlah Ekuitas Tidak Terikat	xxx	Xxx

Ekuitas Terikat Temporer	xxx	Xxx
Ekuitas Terikat Permanen	xxx	Xxx
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	xxx	Xxx

Sumber:PMK No. 76/PMK.05/2008

Dari kutipan wawancara beliau menjelaskan bagaimana penyajian atas Neraca yang disajikan dalam Laporan Keuangan 2014 yaitu:

Neraca yang kita miliki menyajikan informasi tentang asset lancar, asset tetap dan kewajiban dan ekuitas dana (Kasubag Akuntansi Bu Umihanik, 27 Mei 2015)”.

1. Aset lancar

a. Kas dan setara kas

Kas lainnya adalah kas yang ada pada BLU selain kas Bendahara Pengeluaran dan Kas pada BLU. Termasuk dalam setara kas adalah akun kas lainnya dibendahara pengeluaran.

Untuk kas dan setara kas disini diakui pada saat adanya aliran kas yang masuk ke BLU. Sementara untuk pengukuran atas kasnya dicatat sebesar nominal pada saat diterima (Kasubag Akuntansi Bu Umihanik, 27 Mei 2015)”.

Jadi untuk pengakuan dan dan pengukuran atas kas dan setara kas di UIN Maliki malang sudah sesuai dengan PP No 71 tahun 2010 yang tercantum dam paragraph standar No 69 bahwa dijelaskan dalam paragraf tersebut pengukuran *asset* atas kas dan setara kas dicatat sebesar nilai nominal.

b. Piutang

Piutang dari kegiatan operasional BLU adalah hak tagih kepada pihak lain yang timbul karena adanya penyerahan kegiatan operasional BLU misalnya Piutang SPP mahasiswa.

Piutang yang kami sajikan dalam laporan keuangan di Neraca adalah bersumber dari SPP yang dibayarkan dari mahasiswa yang belum dibayarkan sehingga piutang itu terjadi pada saat pendapatan belum diterima tetapi sudah diakui sebagai piutang. Dan untuk pengukuran piutang yang disajikan dalam Laporan Neraca sebesar nilai nominal (Kasubag Akuntansi Bu Umihanik, 27 Mei 2015)”.

Dari uraian yang dipaparkan oleh kasubag Akuntansi UIN Malang piutang adalah pendapatan usaha dan jasa lainnya yang masih belum direalisasikan sehingga pengakuan atas piutang ini merupakan pengakuan pendapatan dengan akrual basis. Sementara untuk pengukurannya sudah sesuai dengan PP No. 71 tahun 2010 yang dijelaskan bahwa untuk pencatatan piutang dicatat sebesar nilai nominal.

c. Persediaan

Persediaan adalah bahan dan perlengkapan untuk digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, seperti bahan yang digunakan dilaboratorium untuk kegiatan praktikum atau penelitian. Beliau menjelaskan persediaan yang dimiliki UIN Maliki Malang yaitu:

Persediaan yang kita miliki untuk kegiatan yang mendukung kegiatan pendidikan seperti alat-alat yang digunakan untuk laboratorium yang habis pakai serta perlengkapan untuk membantu proses belajar mengajar penghapus papan tulis dan juga perlengkapan kantor. Pengukuran persediaan tertuk persediaan sendiri adalah sebesar biaya perolehan karena persediaan didapat dari pembelian (Kasubag Akuntansi Bu Umihanik, 27 Mei 2015)”.

Dari kutipan wawancara dengan Kasubag Akuntansi tersebut untuk pengakuan atas persediaan pada PP No. 71 tahun 2010 dijelaskan bahwa

pencatatan atas persediaan yaitu yang pertama dicatat sebesar biaya perolehan jika diperoleh dengan pembelian, yang kedua dicatat dengan biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, yang terakhir dicatat dengan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Dan untuk pencatatan atas pengukuran persediaan yang dimiliki UIN Maliki Malang sudah sesuai dengan standar PP No. 71 tahun 2010 yaitu dengan mencatat atas persediaan sebesar biaya perolehan karena diperoleh dengan pembelian.

2. Aset tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki dan atau dikuasai oleh BLU yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Yang digunakan dalam kegiatan BLU. Adapun aset tetap yang dimiliki oleh UIN Maliki Malang adalah:

Untuk aset tetap yang dimiliki UIN Maliki Malang yang mendukung kegiatan operasional UIN Maliki Malang yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun, aset tetap yang dimiliki UIN Maliki Malang diklasifikasikan sebagai berikut

- 1) tanah,
- 2) peralatan dan mesin termasuk didalamnya kendaraan dinas,
- 3) Gedung dan bangunan,
- 4) Jalan irigasi dan jaringan,
- 5) Konstruksi dalam pengerjaan,
- 6) Dan aset tetap lainnya

aset tetap lainnya ini termasuk pada extra countable yaitu nilainya dibawah ketentuan belanja modal tetapi masih diakui sebagai aset tetap.

Untuk pengakuan dari aset tetap yang dimiliki UIN Maliki Malang adalah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut yang biasanya disebut harga perolehan. Sementara untuk pengukuran aset tetap yang dimiliki UIN Malang

adalah diukur berdasarkan dari harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan setiap tahunnya (Kasubag Akuntansi Bu Umihanik, 27 Mei 2015).

Maka untuk aset tetap yang sudah dijelaskan oleh Bu Umi sebagai Kasubbag Akuntansi dapat disimpulkan untuk pengakuan dan pengukurannya sudah sesuai dengan PP No 71 tahun 2010 dimana untuk pengakuan atas aset tetap disebutkan bahwa pengakuan untuk aset tetap dicatat sebesar harga perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat diperoleh. Dan untuk penyusutannya sendiri kecuali tanah dan konstruksi dalam pengerjaan dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Sementara di UIN Maliki Malang beliau menjelaskan bahwa:

Untuk metode penyusutan yang digunakan di UIN Maliki Malang dengan menggunakan sistem yang sudah disediakan oleh pemerintah yaitu dengan menggunakan SIMAK BMN dengan menggunakan aplikasi SIMAK BMN tersebut aset tetap yang dimiliki sudah langsung menyusut. dalam aplikasi tersebut kita langsung memasukkan belanja modal atas aset yang kita miliki dan secara otomatis menyusut untuk aset yang kita miliki sehingga tidak perlu menghitung manual (Kasubag Akuntansi Bu Umihanik, 27 Mei 2015).

Sehingga peneliti juga kurang mengetahui mengenai metode yang digunakan untuk penyusutan atas aset tetap yang dimiliki oleh UIN Maliki Malang, karena didalam Catatan atas Laporan Keuangan juga tidak dicantumkan untuk kebijakan Akuntansi Atas penyusutan aset tetapnya.

3. Kewajiban

Kewajiban adalah kewajiban masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya dimasa depan akan mengakibatkan arus keluar dari

sumber daya BLU yang mengandung manfaat ekonomi adapun klasifikasi kewajiban yang dimiliki oleh UIN Maliki Malang adalah:

Kewajiban yang kita miliki disini hanya kewajiban jangka pendek adalah berasal dari biaya yang masih harus dibayar atas sampai tanggal pelaporan yaitu misalnya: kewajiban pada pihak ketiga gaji dosen dan pegawai PNS yang belum dibayar pada tahun berjalan. Beliau juga menjelaskan pengakuan atas kewajiban sudah accrual basis untuk akhir tahun anggaran. Dan untuk pengukuran atas kewajiban yang dimiliki oleh UIN Maliki Malang Adalah dicatat sebesar biaya kas yang seharusnya diserahkan untuk menyelesaikan utang tersebut atau sering disebut dengan nilai nominal (Kasubag Akuntansi Bu Umihanik, 27 Mei 2015).

Dari paparan yang sudah dijelaskan oleh Kasubbag Akuntansi UIN Maliki Malang, kewajiban yang dimiliki sudah sesuai dengan standart PP No 71 tahun 2010 atas pengakuan dan pengukuran kewajiban yang dijelaskan didalam standar bahwa kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, termasuk pengakuan akan utang gaji yang masih harus dibayar kepada pihak ketiga, sementara untuk pengukurannya dijelaskan bahwa kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

4. Ekuitas dana

Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang yang dimiliki BLU.

Ekuitas dana yang dimiliki UIN Maliki Malang adalah selisih antara aset yang dimiliki dengan kewajiban yang dimiliki (Kasubag Akuntansi Bu Umihanik, 27 Mei 2015)."

Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan wawancara dengan Kasubag Akuntansi penyajian laporan Neraca yang disajikan oleh Uin Maliki Malang

sudah sesuai dengan PP No. 71 tahun 2010 dengan lampiran 2 yang menjelaskan laporan keuangan dengan dasar atas laporan keuangan *Cash Towart to Accrual* dimana dalam penyajian untuk neraca disajikan dengan basis akrual dimana pengakuan atas aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya. Sementara yang sudah dilakukan oleh UIN Maliki Malang atas pengakuan aset kewajiban dan ekuitas pengakuannya sudah akrual.

Dari hasil wawancara diatas peneliti dapat digambarkan penyajian laporan keuangan atas Neraca pada Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim malang adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2

Neraca

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibragim Malang

Uraian	20X1	20X0
Aset		
Aset Lancar		
Kas dan Setara Kas		
Kas pengeluaran BLU	xxx	xxx
Kas-BLU	xxx	xxx
Kas setara kas lainnya	xxx	xxx
Jumlah kas dan setara kas	xxx	xxx
Piutang	xxx	xxx
Persediaan	xxx	xxx
Jumlah Aset Lancar	xxx	xxx
Aset tetap		
Tanah	xxx	xxx
Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx
Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
Konstruksi Dalam Pengerjaan	xxx	xxx

Akumulasi Penyusutan	xxx	xxx
Jumlah Aset Tetap	xxx	xxx
Jumlah Total Aset	xxx	xxx
Kewajiban		
Kewajiban Jangka Pendek		
Utang pada pihak ketiga	xxx	xxx
Utang Jangka Pendek Lainnya	xxx	xxx
Jumlah kewajiban Jangka Pendek	xxx	xxx
Jumlah Kewajiban	xxx	xxx
Ekuitas		
Ekuitas Dana Lancar	xxx	xxx
Surplus & Defisit tahun lalu	xxx	xxx
Jumlah Ekuitas	xxx	xxx
Jumlah kewajiban dan Ekuitas	xxx	xxx

Sumber: UIN Maliki Malang

2. Laporan Operasional

Laporan operasional adalah laporan yang menyajikan informasi seluruh pendapatan, belanja dan surplus/defisit operasional yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan Operasional yang di jelaskan dalam PP No. 71 tahun 2010 menyajikan informasi tentang:

1. Pendapatan-LO
2. Beban
3. Surplus/defisit dari operasi
4. Kegiatan non operasional
5. Pos luar biasa
6. Surplus/defisit-LO

Adapun contoh format penyajian laporan keuangan sesuai PSAP atas penyajian laporan operasional, contoh format laporan operasional dibawah ini adalah untuk laporan operasional Pemerintah Kota/Kabupaten adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Laporan Operasional
SATKER BLU

Uraian	20X1	20X0
Pendapatan		
Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan		
	xxx	xxx
	xxx	xxx
Hibah		
Terikat	xxx	xxx
Tidak Terikat	xxx	xxx
Pendapatan APBN		
Operasional	xxx	xxx
Investasi	xxx	xxx
Pendapatan Usaha Lainnya		
Hasil Kerja Sama Dengan Pihak Lain	xxx	xxx
Sewa	xxx	xxx
Jasa Lembaga Keuangan	xxx	xxx
Dan Lain-lain	xxx	xxx
Jumlah Pendapatan	xxx	xxx
Biaya		
Biaya Layanan	xxx	xxx
Biaya Pegawai	xxx	xxx
Biaya Bahan	xxx	xxx
Biaya Jasa Layanan	xxx	xxx
Biaya Pemeliharaan	xxx	xxx
Biaya Daya dan Jasa	xxx	xxx
Dan Lain-lain	xxx	xxx
Jumlah biaya Layanan	xxx	xxx
Biaya Umum dan Administrasi		
Biaya Pegawai	xxx	xxx

Biaya Administrasi Perkantoran	xxx	xxx
Biaya pemeliharaan	xxx	xxx
biayaLangganan Daya dan Jasa	xxx	xxx
Biaya Promosi	xxx	xxx
Dan Lain-lain	xxx	xxx
Jumlah biaya Umum dan Administrasi	xxx	xxx
Biaya Lainnya	xxx	xxx
Biaya Bunga	xxx	xxx
Biaya Administrasi Bank	xxx	xxx
Dan Lain-lain	xxx	xxx
Jumlah Biaya Lainnya	xxx	xxx
Jumlah Biaya	xxx	xxx
Surplus/Defisit Sebelum Pos Keuntungan /Kerugian		
Keuntungan/kerugian		
Keuntungan Penjualan aset Non Lancar	xxx	xxx
Rugi penjualan Aset Non Lancar	xxx	xxx
Rugi Penurunan Nilai	xxx	xxx
Dan Lain-lain	xxx	xxx
Surplus/Defisit Sebelum Pos-Pos Luar Biasa		
Pos-pos Luar Biasa		
Pendapatan Dari Kejadian Luar Biasa	xxx	xxx
Biaya dari Kegiatan Luar Biasa	xxx	xxx
Surplus/defisit Tahun Berjalan Bersih	xxx	xxx
Surplus/Defisit tahun berjalan Diluar Pendapatan APBN	xxx	xxx

Sumber:PMK No. 76/PMK.05/2008

Penyajian Laporan Operasional yang disajikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang diperoleh dari wawancara berdama Kasubag akuntansi UIN Maliki Malang bahwa penyajian laporan Operasional adalah:

laporan operasional yang disajikan oleh UIN Maliki Malang yaitu menyajikan informasi tentang kegiatan operasional yang dilakukan selama satu periode, dimana yang disajikan adalah pendapatan dan beban. Adapun

klasifikasi belanja adalah pendapatan Usaha dan Jasa pelayanan, pendapatan hibah dan Pendapatan lainnya. Sedangkan klasifikasi untuk beban adalah beban pegawai dan beban administrasi dan umum. Penyajian informasi ini digunakan untuk mengetahui pendapatan yang diperoleh selama satu tahun dan beban yang dikeluarkan sehingga dapat mengetahui apakah selisih antara pendapatan dan belanja mengamali surplus atau defisit operasional atas kegiatan operasional (Kasubag Akuntansi Bu Umihanik, 27 Mei 2015).”

Dari penjelasan Bu Umi tersebut laporan Operasional sudah sesuai dengan PP No. 71 tahun 2010 karena dalam penyajian yang terdapat dalam standar dijelaskan informasi yang disajikan sudah sesuai baik informasi tentang Pendapatan dan Belanja serta penyajiannya disandingkan dengan tahun sebelumnya. Sehingga penerapan yang dilakukan Uin Maliki malang sudah benar atas penyajian Laporan Operasional. adapun gambaran atas penyusunan Laporan Operasional UIN Maliki Malang adalah:

Tabel 4.4
Laporan Operasional
Universitas Islam Negeri aulana Malik Ibrahim Malang

Uraian	20X1	20X0
Pendapatan Operasional		
Pendapatan Usaha dan Jasa Pelayana	xxx	xxx
Pendapatan Hibah	xxx	xxx
Pendapatan Lainnya	xxx	xxx
Jumlah pendapatan Operasional	xxx	xxx
Beban Operasional		
Beban Pegawai	xxx	xxx
Beban Adminisrasi dan Umum	xxx	xxx
Jumlah Beban Operasional	xxx	xxx
Surplus/Defisit dari Operasional	xxx	xxx

Sumber: UIN Maliki Malang

3. Laporan Realisasi Anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan keuangan yang menggambarkan tentang informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, dan hibah dibandingkan dengan anggaran untuk setiap informasi yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Perbandingan antara anggaran dan realisasi ini untuk menunjukkan ketercapaian target-target yang dicapai oleh BLU. LRA menyajikan informasi sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut:

1. Pendapatan-LRA
2. Belanja
3. Transfer
4. Surplus/Defisit-LRA
5. Penerimaan Pembiayaan

6. Pengeluaran Pembiayaan
7. Pembiayaan Neto
8. Sisa lebih/kurang Pembiayaan Anggaran

Contoh format Laporan Realisasi Anggaran sama dengan Laporan Operasional sehingga dapat digambarkan dalam contoh formatnya untuk Sakker BLU adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5
Laporan Realisasi Anggaran
SATKER BLU

Uraian	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	%	Realisasi 20X0
Pendapatan				
Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan				
	xxx	xxx		
	xxx	xxx		
Hibah				
Terikat	xxx	xxx		
Tidak Terikat	xxx	xxx		
Pendapatan APBN				
Operasional	xxx	xxx		
alisaInvestasi	xxx	xxx		
Pendapatan Usaha Lainnya				
Hasil Kerja Sama Dengan Pihak Lain	xxx	xxx		
Sewa	xxx	xxx		
Jasa Lembaga Keuangan	xxx	xxx		
Dan Lain-lain	xxx	xxx		
Jumlah Pendapatan	xxx	xxx		
Biaya				
Biaya Layanan				
Biaya Pegawai	xxx	xxx		
Biaya Bahan	xxx	xxx		
Biaya Jasa Layanan	xxx	xxx		

Biaya Pemeliharaan	xxx	xxx		
Biaya Daya dan Jasa Dan Lain-lain	xxx	xxx		
Jumlah biaya Layanan	xxx	xxx		
Biaya Umum dan Administrasi				
Biaya Pegawai	xxx	xxx		
Biaya Administrasi Perkantoran	xxx	xxx		
Biaya pemeliharaan	xxx	xxx		
biayaLangganan Daya dan Jasa	xxx	xxx		
Biaya Promosi	xxx	xxx		
Dan Lain-lain	xxx	xxx		
Jumlah biaya Umum dan Administrasi	xxx	xxx		
Biaya Lainnya				
Biaya Bunga	xxx	xxx		
Biaya Administrasi Bank	xxx	xxx		
Dan Lain-lain	xxx	xxx		
Jumlah Biaya Lainnya	xxx	xxx		
Jumlah Biaya	xxx	xxx		
Surplus/Defisit Sebelum Pos Keuntungan /Kerugian				
Keuntungan/kerugian				
Keuntungan Penjualan aset Non Lancar	xxx	xxx		
Rugi penjualan Aset Non Lancar	xxx	xxx		
Rugi Penurunan Nilai	xxx	xxx		
Dan Lain-lain	xxx	xxx		
Surplus/Defisit Sebelum Pos-Pos Luar Biasa	xxx	xxx		
Pos-pos Luar Biasa				
Pendapatan Dari Kejadian Luar Biasa	xxx	xxx		
Biaya dari Kegiatan Luar Biasa	xxx	xxx		
Surplus/defisit Tahun Berjalan Bersih	xxx	xxx		
Surplus/Defisit tahun berjalan Diluar Pendapatan APBN	xxx	xxx		

Sumber:PMK No. 76/PMK.05/2008

Kasubbag Akuntansi menjelaskan tentang penyajian laporan keuangan atas Laporan Realisasi Anggaran adalah sebagai berikut:

“Untuk Laporan Realisasi Anggaran itu sendiri mencakup informasi tentang membandingkan pendapatan dan belanja, dan hibah yang telah dianggarkan dengan realisasi yang terjadi (Kasubag Akuntansi Bu Umihanik, 27 Mei 2015).”

Adapun yang informasi yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dalam Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan

Klasifikasi pendapatan yang di miliki oleh Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang adalah sebagai berikut:

a) Pendapatan dan usaha jasa lainnya

Pendapatan dan jasa usaha lainnya adalah pendapatan BLU yang diperoleh sebagai imbalan jasa yang diserahkan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi BLU

“Pendapatan usaha dan jasa layanan yang dimiliki UIN Maliki Malang itu bersumber dari Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) yang diperoleh dari mahasiswa, biaya pendaftaran Mahasiswa baru, biaya untuk wisuda. Dan untuk pengakuan pendapatan usaha dan jasa Pelayanan ini diakui dengan basis Akrual (Kasubag Akuntansi Bu Umihanik, 27 Mei 2015).”

b) Hibah

Pendapatan hibah adalah setiap penerimaan BLU dalam bentuk uang, barang, jasa atau surat berharga yang diperoleh dari pemberian hibah yang tidak perlu dibayar kembali, sehingga BLU mendapat Manfaat secara

langsung yang digunakan untuk mendukung fungsi BLU. Dalam kutipan wawancara dengan Bu Umi.

Untuk pendapatan atas hibah di UIN Maliki Malang tidak memiliki pendapatan atas hibah tetapi dalam penyusunan laporan keuangan tetap dicantumkan untuk rekening Hibah dalam laporan keuangan karena untuk LK 2014 kita tidak mendapatkan hibah sehingga informasi atas Hibah untuk tahun ini tidak ada (Kasubag Akuntansi Bu Umihanik, 27 Mei 2015)."

c) Pendapatan usaha lainnya

Pendapatan usaha lainnya merupakan pendapatan yang diperoleh dari aktivitas yang tidak berhubungan tugas dan fungsi BLU. Dalam kutipan wawancara bu umi menjelaskan tentang pendapatan usaha lainnya.

"Pendapatan usaha lainnya ini diperoleh dari pentawaan atas asset BLU seperti penyewaan gedung untuk acara Pernikahan, sewa Bus UIN Maliki Malang, dan untuk pengakuan atas kegiatan sewa tersebut UIN Maliki Malang mengakuinya pada saat biaya sewa telah dibayarkan oleh pihak penyewa (Kasubag Akuntansi Bu Umihanik, 27 Mei 2015)."

Dari uraian wawancara diatas bahwa untuk pendapatan Usaha lainnya diakui pada saat kas diterima oleh UIN Maliki Malang disebut juga dengan *Cash Basis*. Sehingga pada akhir periode perlu adanya penyesuaian jika pendapatan tersebut belum terealisasi.

2. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening Kas Umum Negara Negara/Daerah. Rekening belanja yang terdapat dalam Laporan keuangan UIN Maliki Malang dijelaskan dalam wawancara bahwa:

Didalam Laporan Realisasi Anggaran yang kita miliki belanja itu terdiri dari belanja pegawai dan belanja operasional (Kasubag Akuntansi Bu Umihanik, 27 Mei 2015)."

a. Belanja pegawai.

Belanja pegawai yang kita miliki atau yang kita keluarkan adalah belanja untuk kepentingan pegawai saja. Seperti untuk administrasi seperti pembelian ATK untuk pegawai masuk pada belanka pegawai. Untuk pengakuan belanja pegawai untuk sekaraang ini sudah accrual basis sementara untuk pada tahun 2014 pengakuanya masih kas basis (Kasubag Akuntansi Bu Umihanik, 27 Mei 2015)."

b. Belanja operasional.

Biaya operasional diklasifikasikan sebagai biaya-biaya yang diperlukan untuk pengeluaran pelayanan pendidikan seperti gaji pegawai, gaji dosen, biaya pemeliharaan. Untuk pengakuannya untuk sekarang ini sudah accrual basis sementara untuk tahun 2014 masih cash basis (Kasubag Akuntansi Bu Umihanik, 27 Mei 2015)."

Dari penjelasan wawancara dengan Kasubag Akuntansi UIN Maliki Malang dapat dianalisis bahwa Laporan Realisasi Anggarannya untuk tahun 2014 belum sudah dengan PP No 71 Tahun 2010 dalam standar tersebut dijelaskan bahwa untuk organisasi yang belum siap secara penuh menggunakan akrual basis sepenuhnya menggunakan dasar atas Laporan keuangan dengan basis *Cash Towart to Accrual* dimana dalam dalam standar tersebut dijelaskan untuk basis kas digunakan untuk pengakuan pendapatan dan belanja, sementara yang terjadi di UIN Maliki malang untuk pengakuan belanja untuk pegawai dan belanja operasional pengakuannya masih *cash basis*, Sedangkan pendapatan pengakuannya sebagian berbasis akrual dan sebagian berbasis kas, sehingga perlu adanya penyesuaian pada akhir periode atas pendapatan dan belanja yang pengakuannya masih berbasis kas. Sehingga LRA dapat disusun sesuai dengan PP No. 71 tahun 2010, dimana dengan adanya

penyesuaian tersebut dalam penyusunan laporan LRA tersebut pengakuan atas pendapatan dan belanja dari awal seolah-olah sudah menggunakan *accrual basis*. Beritupun yang terjadi pada tahun 2015 untuk pengakuan atas belanja dan beban masih sama menggunakan basis kas sedangkan dalam standart harus sudah akrual untuk tahun 2015 sehingga untuk Laporan keuangan 2015 LRA belum sesuai dengan PP No. 71 tahun 2010. Ilustrasi LRA pada Laporan Keuangan tahun 2014 UIN Maliki Malang adalah:

Tabel 4.6
Laporan Realisasi Anggaran
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Uraian	Anggaran 2014	Realisasi 2014	%	Realisasi 2013
Pendapatan				
Pendapatan Usaha dan Jasa Layanan	xxx	xxx		xxx
Pendapatan Hibah	xxx	xxx		xxx
Pendapatan Lainnya	xxx	xxx		xxx
Jumlah Pendapatan	xxx	xxx		xxx
Belanja				
Belanja Operasional				
Belanja pegawai	xxx	xxx		xxx
Belanja Administrasi dan Umum	xxx	xxx		xxx
Jumlah Belanja Operasional	xxx	xxx		xxx
Biaya Operasional	xxx	xxx		xxx
Surplus/Defisit	xxx	xxx		xxx
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	xxx	xxx		xxx

Sumber: UIN Maliki Malang

4. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan memuat pengungkapan dan penjelasan informasi yang disajikan dalam LRA, Neraca, dan catatan atas laporan Keuangan, sehingga pengguna laporan keuangan dapat memperoleh pemahaman secara lebih lengkap atas Laporan keuangan BLU berdasarkan PP No. 71 tahun 2010.

“Catatan atas laporan Keuangan yang disajikan dalam Laporan Keuangan UIN Maliki Malang menjelaskan tentang penjelasan atas informasi yang terdapat dalam LRA, Neraca, dan Laporan Operasional, yaitu menjelaskan penjelasan-penjelasan seberhanya misalnya pada pendapatan dijelaskan sumbernya darimana saja. Sementara untuk penjelasan atas LRA mengenai pendapatan yang tertealisasi berapa dari anggaran yang telah dianggarkan. Sementara untuk kebijakan atas penyusutan aset tidak dijelaskan karena UIN Maliki Malang menggunakan aplikasi dari Pemerintah bernama SIMAK BMN aplikasi ini adalah aplikasi langsung untuk penyusutan dengan memasukkan belanja Modal dan akan mengalami penyusutan secara otomatis (Kasubag Akuntansi Bu Umihanik, 27 Mei 2015).”

Penjelasan diatas dapat di analisis bahwa Catatan atas Laporan keuangan yang disajikan oleh UIN Maliki Malang tidak sepenuhnya sesuai dengan PP No. 71 tahun 2010 sehingga penjelasan-penjelasan seperti pengukuran rekening-rekening yang perlu dinformsikan kepada pengguna Laporan keuangan, seperti metode penyusutan atas aset tetap serta pengukuran aset juga perlu disajikan, Informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan atas laporan keuangan juga perlu disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Selain itu juga menjelaskan atas rincian pendapatan dan belanja yang diperoleh dan yang dikeluarkan oleh UIN Maliki Malang, informasi tentang dasar pengukuran atas penyusunan laporan keuangan.

Dengan adanya informasi tersebut penguana dapat lebih memahami informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Serta juga dapat membandingkan dengan laporan keuangan sebelumnya.

Kesimpulan atas penelitian ini adalah bahwa laporan Keuangan tahun 2014 sudah sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 *Cash Towart to Accrual* sedangkan Laporan Keuangan Tahun 2015 belum sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 karena Laporan Keuangan pada tahun 2015 masih *Cash Towart to Accrual* sedangkan dalam PP No. 71 Tahun 2010 untuk pelaporan keuangan tahun 2015 harus sudah *Full Accrual*. Kendala yang diperoleh UIN Maliki Malang adalah karena pihak KPPN tidak Mengakui atas Utang untuk belanja yang masih harus dibayar sedangkan UIN Maliki Malang harus mengakui utang atas belanja yang masih harus dibayar. Karena tidak adanya titik temu antara keduanya sehingga UIN maliki Malang Mengikuti pusat yaitu KPPN.